



KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022

**Mendukung Percepatan
Pencegahan Stunting**

Webinar Sosialisasi DAK, DID & APBD Untuk Percepatan
Pencegahan Stunting Tahun Anggaran 2022

Jakarta, 24 Mei 2021



Ringkasan Eksekutif

- Prevalensi Stunting Indonesia saat ini 27,7% (2019), menempatkan Indonesia pada peringkat ke-2 di Asia Tenggara dan ke-25 di dunia. Target 2024 19% (RPJMN 2020-2024) dan Arah Presiden Target 14% di 2024.
- Pendanaan yang diberikan melalui TKDD telah disusun dengan desain transfer yang konvergen untuk mengintegrasikan berbagai sumber TKDD dalam penanggulangan stunting melalui penerbitan PMK No. 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi.
- Komitmen dan konvergensi di daerah ini harus tercermin dalam pendanaan APBD. Pendanaan dalam APBD tersebut juga harus disinergikan dengan dukungan dari Pemerintah Pusat, baik melalui belanja K/L maupun transfer ke daerah dan juga yang didanai melalui Desa. Dengan demikian, berbagai sumber dana tersebut dapat memberikan hasil yang paling optimal dalam upaya penurunan stunting.
- Dukungan TKDD untuk penanggulangan stunting sejak tahun 2018 telah dilakukan melalui Dana Insentif Daerah, Dana Desa, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Non Fisik).
- DAK Fisik dilakukan melalui bidang Kesehatan dan KB, Bidang Air Minum, dan Bidang Sanitasi, sedangkan DAK Nonfisik melalui BOK Stunting, BOKB, dan BOP PAUD. Dukungan DAK Fisik dan DAK Non Fisik untuk pencegahan stunting di tahun 2021 diperluas dengan bertambahnya bidang Lingkungan Hidup untuk DAK Fisik dan Jenis Ketahanan Pangan untuk DAK Non Fisik.



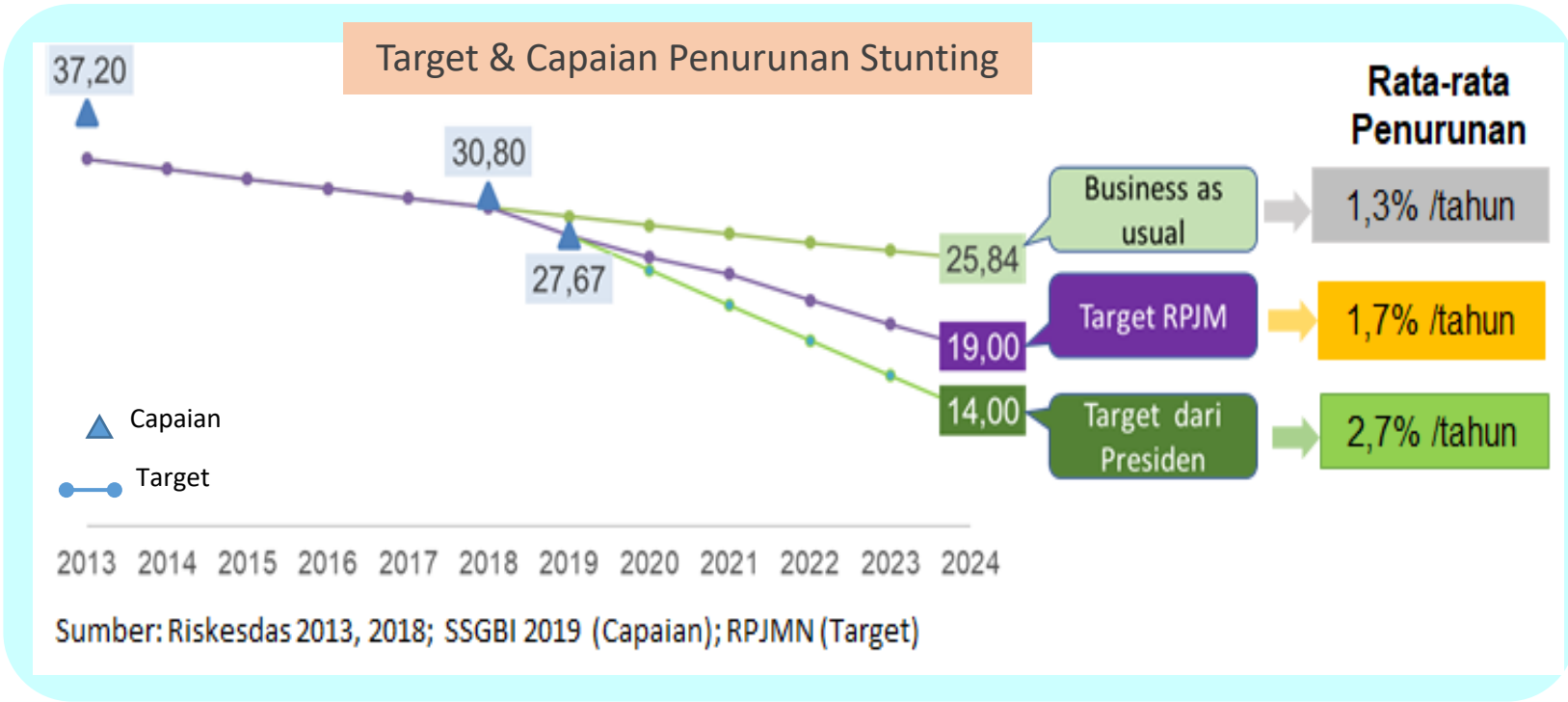
1

Perkembangan Kondisi Stunting di Indonesia





Tingkat Prevalensi Stunting saat ini (27,7%) dan Target 2024 (14%)



Berdasarkan data WHO, World Bank, dan UNICEF, **Indonesia** berada di **peringkat ke-25** dari daftar peringkat prevalensi stunting di 146 negara di dunia. (Ranking 1 merupakan negara dengan prevalensi stunting tertinggi, yaitu Burundi 55,90).

Peru merupakan salah satu negara yang telah berhasil mengatasi stunting (dari 22.9% pada tahun 2005 menjadi 17.9% pada tahun 2010).

- Untuk mencapai target prevalensi stunting 14% di tahun 2024 dibutuhkan **rata-rata penurunan prevalensi stunting setiap tahunnya sebesar 2,7% dalam 5 tahun**.
- Untuk bisa mencapai target prevalensi 14% dibutuhkan Stranas Penanganan Stunting yang lebih agresif/tajam serta kerja keras dari Pemerintah Pusat dan Daerah.

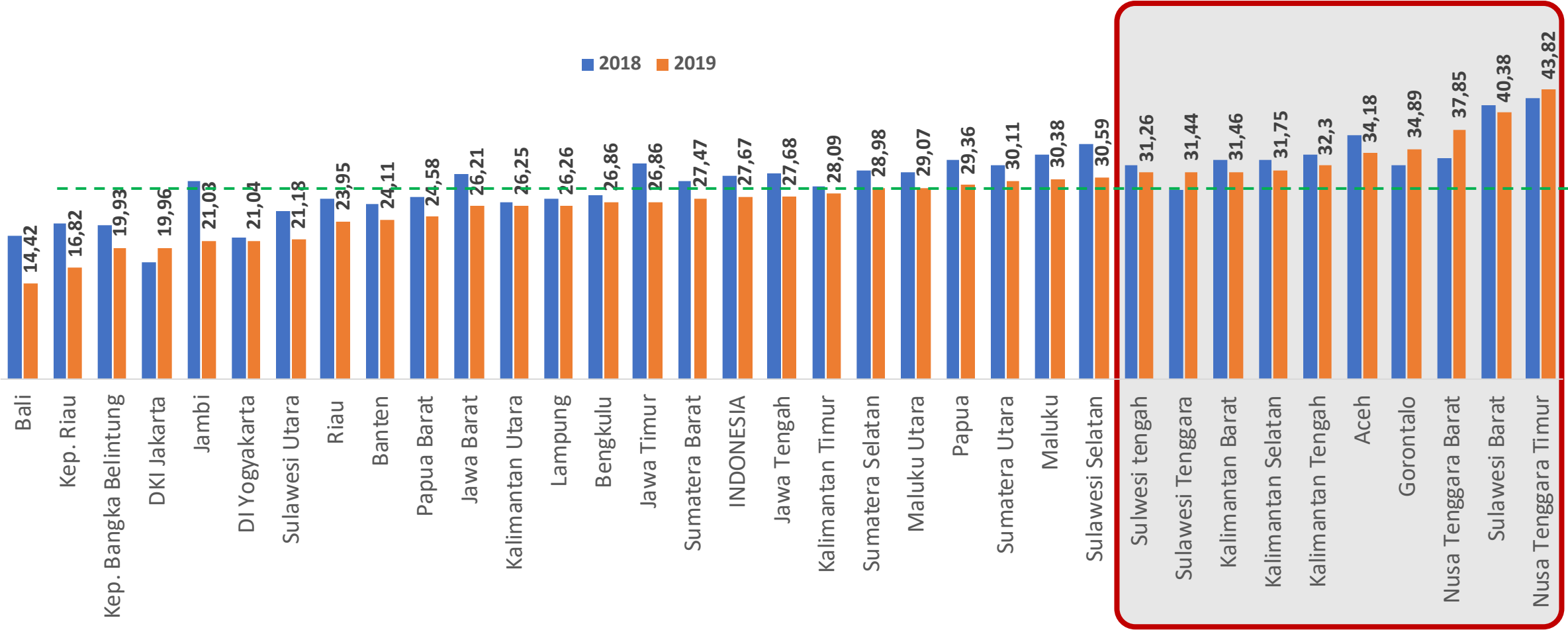
Di kawasan Asia Tenggara

No	Negara	Prevalensi Stunting
1	Myanmar	29,2
2	Indonesia	27,7
3	Vietnam	24,6
4	Malaysia	20,7
5	Brunei	19,7
6	Thailand	10,5
7	Singapore	4,4



Prevalensi Stunting per Provinsi

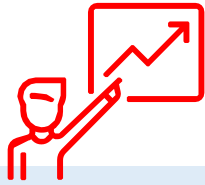
Masih terdapat Provinsi dengan prevalensi yang tinggi



- Prevalensi stunting sudah menurun pada sebagian besar provinsi
- Penurunan angka *stunting* **tidak merata** antar provinsi
- Terdapat 10 **provinsi** yang memiliki tingkat **prevalensi stunting**-nya paling **tinggi**

Permasalahan Percepatan Penurunan Stunting

Perlunya penguatan intervensi terintegrasi, melalui:



KONVERGENSI PROGRAM

- Konvergensi program **di tingkat pusat & daerah belum optimal**
- Perpres Stunting **akan memperkuat** konvergensi di kab/kota dan desa



PENAJAMAN SASARAN DAN INTERVENSI

- Intervensi terintegrasi **belum sepenuhnya menyasar** rumah tangga 1.000 HPK (hari pertama kehidupan)



PENDAMPINGAN KAB/KOTA DAN DESA

- Kebijakan penurunan stunting **belum diterjemahkan dalam perencanaan & penganggaran**
- Diperlukan penguatan pendampingan di tingkat kabupaten/kota dan keluarga.



PENGUATAN SISTEM & DATA

- Sistem pemantauan & evaluasi terintegrasi
- **Belum adanya “satu data”** intervensi **penurunan stunting** untuk menyasar rumah tangga 1.000 HPK



2

Kebijakan dan Strategi Upaya Percepatan Penurunan Stunting





Strategi Nasional Penurunan Stunting

Strategi Nasional Penurunan Stunting (Stranas) yaitu Intervensi **Terintegrasi dan Konvergen** (Gizi spesifik dan sensitif) melalui **pendekatan keterlibatan multi-sektor** sudah ditetapkan Wakil Presiden pada Tahun 2018

Proses perencanaan dan penganggaran untuk intervensi pencegahan stunting mulai berjalan dengan baik mengacu ke Stranas tersebut, namun **perlu penajaman intervensi sampai dengan ke tingkat desa dan keluarga.**

Masih perlu perbaikan sinkronisasi database sasaran keluarga 1.000 HPK, Sumberdaya manusia pendamping & penyuluh, dan koordinasi pelaksanaan antar K/L/Pemda

Belum ada institusi/pihak yang berperan aktif memastikan integrasi dan konvergensi intervensi **di lapangan.**

Percepatan RPerpres untuk menguatkan **Stranas dan peran Koordinator lapangan/penggerak keluarga**



Konvergensi Dukungan Anggaran untuk Penurunan Stunting TA 2021

AKSI INTEGRASI/KONVERGENSI (APBN, APBD dan/ atau APB-Desa)

APBN

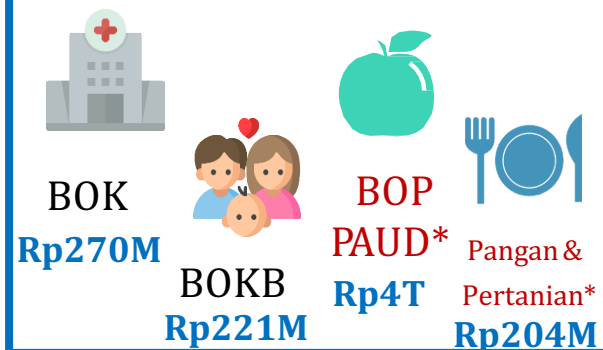
20 K/L

Pagu Awal APBN 2021
Level Analisis
Lanjutan*

Rp32,98 T

*Pagu level analisis lanjutan merupakan data sementara yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada K/L terkait

DAK Nonfisik



DAK Fisik



Dana Desa + DID



Dana Desa

Dilaksanakan melalui Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kemendesa PDTT

DID

DID dalam perhitungan dilakukan per variabel sehingga terlihat kinerja daerah khususnya penanganan stunting.

Perubahan bidang disepakati bersama oleh Kementerian Keuangan, Bappenas dan K/L Teknis

Penggunaan dana mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.



Evaluasi TKDD untuk Pencegahan Stunting

Kendala dan Tantangan

1. Kurangnya koordinasi lintas sektor di pemerintah pusat dan daerah
2. Daerah lokus belum mengetahui menu-menu DAK Fisik terkait stunting
3. Kurangnya pemahaman daerah atas stunting
4. Penyusunan laporan pelaksanaan penanganan stunting di desa

Mekanisme Monitoring

1. Memantau proses usulan daerah DAK Fisik (untuk melihat daerah-daerah lokus yang belum mengusulkan)
2. Memantau usulan daerah DAK Fisik (menu, jenis usulan, dan unit cost)
3. Memantau kinerja pelaksanaan di daerah (penyaluran dan penyerapan)

Rencana TA 2021-2022

1. Melakukan koordinasi dengan Bappenas dan KL terkait potensi bidang-bidang yg dapat mendukung penanggulangan stunting dalam DAK Fisik
2. Mengevaluasi menu stunting DAK Fisik 2021
3. Sosialisasi menu stunting kepada daerah lokus
4. Penyusunan Perpres Stranas Penanggulangan Stunting
5. Penyempurnaan mekanisme pemantauan penggunaan BOK dan BOKB
6. Sosialisasi kewajiban pelaporan stunting sebagai syarat penyaluran Dana Desa



3

Kebijakan Dana Alokasi Khusus TA 2022





Perkembangan Kebijakan DAK Fisik TA 2021-2022

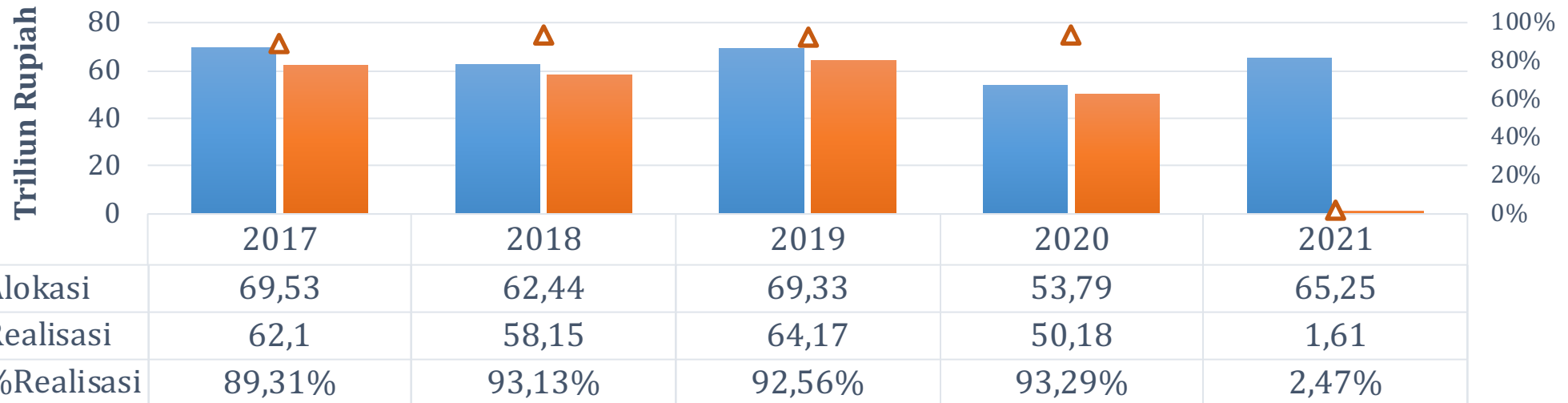
DAK Fisik terus didorong untuk semakin fokus dan sesuai dengan prioritas utama Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Realisasi Penyaluran DAK Fisik

Per 18 Mei 2021

Per 18 Mei 2021

DAK FISIK



2021

- ✓ Refocusing dan reclustering DAK Fisik kedalam tema-tema Prioritas Nasional (tema utama: Standar Layanan Minimal & Infrastruktur Dasar, Penurunan Stunting, Penanggulangan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, dan Ekonomi Berkelanjutan)
- ✓ Fokus pada lokus-lokus prioritas pada setiap tema
- ✓ **Jumlah Bidang : 14 (penghapusan Bidang Pasar dan Bidang Sosial).**

2022

- ✓ Fokus pada Bidang yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi sebagai respon terhadap dampak pandemi COVID-19;
- ✓ Mendukung pencapaian prioritas nasional melalui kebijakan DAK Fisik berbasis Tematik (Pariwisata, Food Estate, Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di Kawasan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua)
- ✓ Refocusing pada menu/kegiatan agar bernilai signifikan untuk menuntaskan hambatan pelaksanaan DAK Fisik di Daerah.
- ✓ **Jumlah Bidang : 16 (penambahan Bidang UMKM dan Bidang Perdagangan).**

Usulan DAK Fisik relatif lebih tinggi daripada alokasi yang tersedia, misal: Usulan TA 2021 mencapai Rp.367,5 T, Alokasi DAK Fisik yang tersedia Rp.63,6 T (17,3%). Daerah harus lebih fokus dalam membuat usulan DAK Fisik.



Evaluasi dan Tantangan DAK Fisik

Adanya keterbatasan alokasi DAK Fisik, sehingga usulan DAK Fisik harus fokus dan sesuai dengan prioritas utama Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Isu Strategis

- Penyusunan standar unit cost perlu memperhatikan ketuntasan dan mendukung capaian kinerja output
- Pentingnya dukungan Bidang Jalan terhadap berbagai bidang dan Tema Prioritas di DAK Fisik
- Masih adanya kasus korupsi DAK Fisik di Daerah diperlukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan DAK Fisik dan peran serta aktif Kepala Daerah
- Penguatan peran APIP dalam pengawasan implementasi DAK Fisik
- Alokasi kurang focus pada bidang/daerah tertentu, sehingga alokasi per daerah tidak signifikan

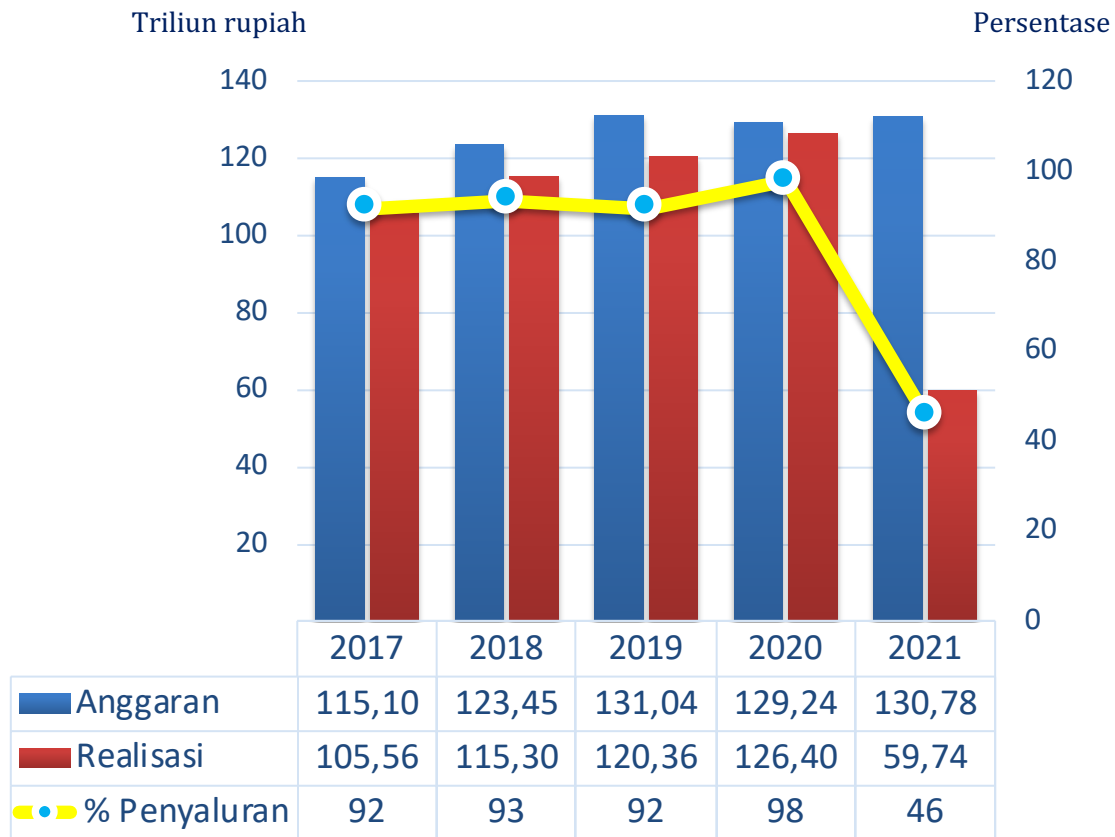
Tantangan

- 1 Pelibatan APIP daerah untuk menjaga governance dan akurasi Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Output masih terkendala **jumlah dan kapabilitas SDM APIP yang masih terbatas.**
- 2 Masih terdapatnya beberapa permasalahan dalam pelaksanaan DAK Fisik antara lain:
 - Permasalahan **pengadaan barang/jasa**
 - **Keterlambatan proses** administrasi di daerah.
- 3 Hambatan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik karena terdapat beberapa interest pribadi yg berdampak pada masalah hukum



Evaluasi DAK Nonfisik TA 2020

Penyaluran DAK Nonfisik 2017-2021



Per 17 Mei 2021

Evaluasi Pelaksanaan DAK Nonfisik 2020

- ❑ Alokasi DAK Nonfisik TA 2020 berdasarkan Perpres 72/2020 sebesar Rp129,2 triliun dengan capaian realisasi penyaluran sebesar Rp126,4 triliun (97,8%);
- ❑ Persentase penyaluran TA 2020 lebih tinggi dari TA 2019, salah satunya dikarenakan adanya kebijakan relaksasi penyaluran, yaitu meniadakan syarat minimal penyerapan dana yang telah salur ke RKUD, kecuali BOS dan Tunjangan Guru PNSD

Isu dan Tantangan

- ❑ Pandemi COVID-19 menyebabkan hambatan penyerapan DAK Nonfisik di daerah karena keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan;
- ❑ Penyiapan alokasi BOKT untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) daerah belum didukung percepatan pembayaran kepada tenaga kesehatan di daerah.
- ❑ Diperlukan sinergi dan koordinasi yang lebih intensif antara Kemenkeu, Kemendagri, dan Kemenkes dengan daerah dalam rangka percepatan pembayaran insentif tenaga kesehatan dan *monitoring* pembayaran insentif nakes.



Arah Kebijakan Dan Strategi Pengalokasian DAK Nonfisik TA 2022



Arah Kebijakan

1. Pengalokasian DAK Nonfisik yang mampu mendorong peningkatan capaian *output* dan *outcome* serta mendukung kualitas layanan.
2. Dukungan pendanaan DAK Nonfisik bagi program prioritas nasional yang menjadi fokus APBN TA 2022 melalui verifikasi atas usulan DAK Nonfisik yang efektif dan sejalan prioritas nasional Tahun 2022.
3. Penyempurnaan besaran unit cost dengan penerapan *unit cost majemuk* untuk Dana BOS, BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan
4. Perluasan target *output* Tunjangan Guru dengan penambahan output guru PPPK untuk TPG, Tamsil dan TKG hasil formasi/penerimaan PPPK guru tahun 2021, sesuai amanat UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.
5. Pemantauan capaian *output/outcome* dalam rangka mendukung pemenuhan SPM daerah melalui Integrasi pelaporan antar Kementerian.
6. Pendanaan untuk mendukung kegiatan Bidang Industri Kecil dan Menengah yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk di dalam Sentra IKM.

Strategi Pengalokasian

1. Mempertimbangkan kinerja penyerapan anggaran dan kinerja output Pemerintah Daerah;
2. Menerapkan PMK 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah dalam penentuan lokus;
3. Normalisasi target output 2022 dengan pendanaan yang tersedia;
4. Sinkronisasi pendanaan dan kebijakan kegiatan DAK Nonfisik dengan Kementerian Teknis dan Bappenas.

Sasaran 2022



Bantuan Operasional Sekolah
untuk 45.149.930 siswa



BOP PAUD
untuk 6.693.626 peserta didik



BOP Pendidikan Kesetaraan
untuk 729.645 peserta didik



Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk 245 daerah



Tunjangan Profesi Guru PNSD untuk Guru PNSD: 1.031.786, Guru PPPK: 17.429
Tunjangan Khusus Guru PNSD untuk Guru PNSD: 25.003, Guru PPPK: 13.835
Tambahan Penghasilan Guru PNSD untuk Guru PNSD: 186.061, Guru PPPK: 328.699



BOP Museum & Taman Budaya untuk 118 Museum, 24 TB



Bantuan Operasional Kesehatan untuk 10.203 puskesmas



Bantuan Operasional KB untuk 6.036 Balai Penyuluhan KB



Dana Pelayanan Kepariwisata untuk 108.236 peserta pelatihan



Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM untuk 85.000 Peserta Pelatihan



Bantuan BLPS untuk 3 Instalasi PSEL



Dana Fasilitas Penanaman Modal untuk bimbingan/sosialisasi kepada 111.624 peserta



Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk 2.500 kelompok masyarakat



Dana penguatan kapasitas kelembagaan sentra IKM untuk 89 SIKM

4

Kebijakan Dana Alokasi Khusus TA 2022: Mendukung Percepatan Penurunan Stunting





Konvergensi Dukungan Anggaran untuk Penurunan Stunting TA 2022



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Di TA 2022, Pemerintah Pusat tetap menjadikan Program Penurunan Stunting menjadi salah satu prioritas nasional dalam RKP 2022 dengan perluasan lokus prioritas menjadi seluruh daerah di Indonesia.

AKSI INTEGRASI/KONVERGENSI (APBN, APBD dan/ atau APB-Desa)

APBN

**Kemenkes
Kemen-PU
BKKBN
dll**

DAK Nonfisik



BOK



BOKB



BOP PAUD*



**Pangan &
Pertanian***

DAK Fisik



Kesehatan+KB



Air Minum



Sanitasi

Dana Desa + DID

Dana Desa

Dilaksanakan melalui Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kemendesa PDTT

DID

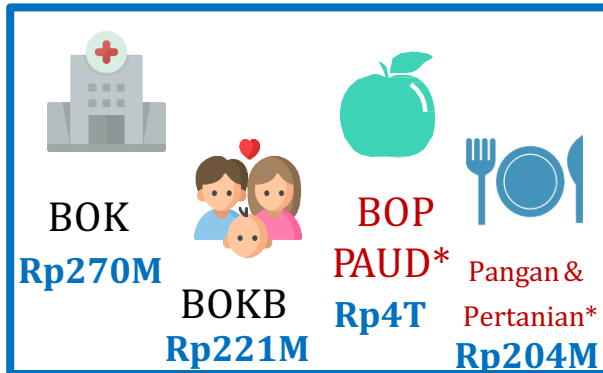
DID dalam perhitungan dilakukan per variabel sehingga terlihat kinerja daerah khususnya penanganan stunting.



Dukungan DAK untuk Penurunan Stunting TA 2021 & 2022

2021

DAK Nonfisik



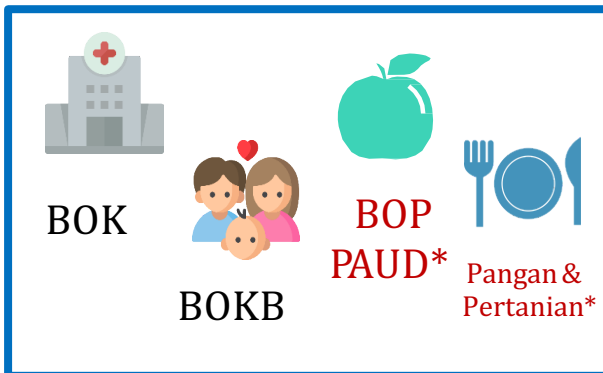
*merupakan bagian kecil dari sub kegiatan penyediaan makanan tambahan untuk peserta didik PAUD yang diberikan dalam rangka mendukung pemenuhan gizi dan kesehatan

DAK Fisik



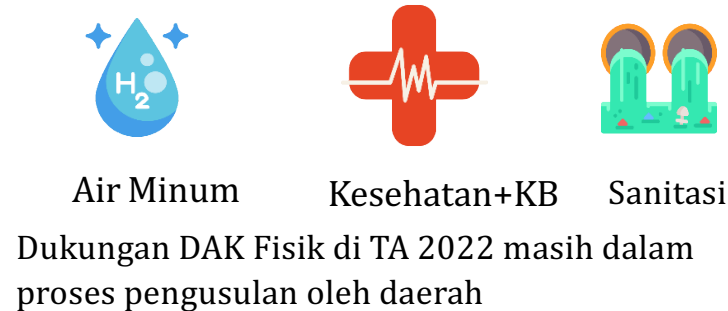
2022

DAK Nonfisik



*merupakan bagian kecil dari sub kegiatan penyediaan makanan tambahan untuk peserta didik PAUD yang diberikan dalam rangka mendukung pemenuhan gizi dan kesehatan

DAK Fisik



Highlights Dukungan DAK

1. Secara umum, dukungan DAK Fisik dan Nonfisik utk penurunan stunting telah dilakukan sejak tahun 2018
2. Alokasi yang telah diberikan DAK Fisik 2021 untuk stunting sekitar 11,26% persen dari total pagu DAK Fisik
3. Secara umum kebijakan DAK Fisik dan Nonfisik di TA 2022 masih melanjutkan kebijakan 2021 dengan penguatan program kegiatan dan konvergensi antar bidang
4. Adanya perluasan cakupan lokasi prioritas stunting dari 360 daerah di TA 2021, menjadi ke seluruh daerah di Indonesia di TA 2022
5. Selain DAK, Kemenkeu juga memberikan dukungan melalui instrumen TKDD lainnya seperti DID, Dana Desa, dan Belanja K/L



Kebijakan DAK Per Bidang untuk Penurunan Stunting TA 2022



KEMENTERIAN KEUANGAN

Jenis DAK	Bidang/Jenis	Kebijakan
DAK Fisik	Bidang Kesehatan dan KB	Mempercepat penurunan prevalensi balita stunting melalui optimalisasi intervensi spesifik dalam pemenuhan gizi ibu hamil dan balita serta penguatan surveilans gizi, edukasi dan pengasuhan
		Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan remaja, calon pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil dan melahirkan melalui pemenuhan standar sarana prasarana dan alat kesehatan (SPA) di Rumah Sakit Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) serta akses pelayanan penunjangnya;
	Bidang Air Minum	Mendukung Desa/Kelurahan intervensi penurunan stunting dan diprioritaskan bagi yang belum pernah mendapatkan intervensi dari pemerintah pusat dan DAK untuk penanganan stunting sebelumnya
	Bidang Sanitasi	Diprioritaskan bagi desa/kelurahan yang sudah ODF selama minimal 1 tahun (paling akhir 31 Januari 2021) berdasarkan data dari STBM, daerah afirmasi, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, serta desa/kelurahan penurunan stunting dan diprioritaskan bagi yang belum pernah mendapatkan intervensi dari pusat dan DAK untuk penanganan stunting sebelumnya
DAK Nonfisik	BOK	Mempercepat penurunan prevalensi balita stunting melalui optimalisasi koordinasi lintas sektor di daerah serta penguatan intervensi spesifik dan sensitif
	BOKB	Mempercepat penurunan prevalensi balita stunting melalui optimalisasi intervensi spesifik dalam pemenuhan gizi ibu hamil dan balita serta penguatan surveilans gizi, edukasi dan pengasuhan;
	BOP PAUD	Mendukung stunting melalui penyediaan makanan tambahan untuk peserta didik PAUD yang diberikan dalam rangka pemenuhan gizi dan kesehatan.
	Pangan dan Pertanian	Menunjang program stunting dalam bentuk kegiatan pekarangan pangan lestari dapat meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta untuk jangka panjang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar



DANA DESA UNTUK Mendukung Penurunan Stunting TA 2021

PAGU DANA DESA TA
2021 : Rp 72 triliun

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

- pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan*
- adaptasi kebiasaan baru Desa.

Antara lain:
*Penurunan stunting di
Desa sbb:*



1. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker (e-HDW);



3. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat



4. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan



2. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);



5. gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - a. kesehatan ibu dan anak;
 - b. konseling gizi;
 - c. air bersih dan sanitasi;
 - d. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - e. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - f. pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - g. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.



PENGUATAN KEBIJAKAN DANA DESA DALAM MENDUKUNG PENURUNAN STUNTING

FORMAT LAPORAN

1

Penetapan PMK Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa)

Penambahan persyaratan dalam penyaluran Dana Desa Tahap III, berupa: laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya

Berlaku Wajib pada tahun 2021

2

Perbaikan laporan dan penambahan cakupan *data entry Village Score Card* - Laporan konvergensi intervensi gizi yang menyasar rumah tangga dengan ibu hamil dan/atau baduta (1.000 hari pertama kehidupan) di Desa dalam aplikasi OM-SPAN Kemenkeu atau interkoneksi aplikasi eHDW Kemendes dengan OM-SPAN

Kebijakan
Dana
Desa TA
2022

Memperkuat fokus penggunaan Dana Desa yaitu memprioritaskan penggunaan Dana Desa dalam rangka:

- 1) program pemulihan ekonomi desa
- 2) dukungan program sektor prioritas di desa, antara lain :
 - a) Mendukung pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk peningkatan kualitas pelayanan desa
 - b) Perluasan penyediaan elektrifikasi desa sesuai dengan kondisi dan potensi desa
 - c) Prioritas lain antara lain seperti: program pembangunan infrastruktur desa melalui program padat karya tunai desa (PKTD), pengembangan desa wisata, ketahanan pangan, ketahanan hewani dan **peningkatan kesehatan masyarakat desa**.

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)						
KABUPATEN DESA :		KECAMATAN TAHUN :				
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1,000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1,000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN		
JUMLAH		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING	
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIAJU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)		
JUMLAH						
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1,000 HPK						
SASARAN	INDIAKTOR				JUMLAH	%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAAN LAYAK				
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN				
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING				
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAAN LAYAK				
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN				
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR				
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA						
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI		
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA			
1	IBU HAMIL					
2	ANAK 0-23 BULAN					
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA						
TABLE 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING						
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING			
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)		
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA					
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					



Indikator DID 2020 – DID 2021

Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan untuk memberikan **insentif/penghargaan** kepada daerah atas **kinerja pemerintah daerah** dalam **perbaikan/pencapaian kinerja** di bidang **tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat**

Kriteria Utama

• 2020

- Opini BPK atas LKPD (WTP)
- Penetapan Perda APBD tepat waktu
- Penggunaan *e-Government* (*e-budgeting* dan *e-procurement*)

Kategori Kinerja

1. Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan Daerah

- a. Kemandirian Daerah
- b. Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah
- c. Creative Financing
- d. Mandatory spending
- e. Ketepatan waktu pelaporan

2. Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan

- a. Angka Partisipasi Murni
- b. Peta Mutu Pendidikan
- c. Rata-rata Nilai Ujian Nasional

3. Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan

- a. **Penanganan Stunting (Baduta)**
- b. **Baduta yang mendapatkan imunisasi lengkap**
- c. **Persalinan di fasilitas kesehatan**

4. Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur

- a. **Akses sanitasi Layak**
- b. **Sumber air minum layak**

5. Kesejahteraan Masyarakat

- a. Penurunan Penduduk Miskin
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

6. Pelayanan Umum Pemerintahan

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- b. Perencanaan Pembangunan Daerah
- c. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- d. Inovasi Pemerintah Daerah

7. Peningkatan ekspor

8. Peningkatan Investasi

9. Pengelolaan Sampah plastik

Kriteria Utama

• 2021 •

- Opini BPK atas LKPD (WTP)
- Penetapan Perda APBD tepat waktu
- Penggunaan *e-Government* (*e-budgeting*, dan *e-procurement*)

Kategori Kinerja

1. Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan Daerah

- a. Kemandirian Daerah
- b. Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah
- c. **Sistem Informasi Keuangan Daerah (baru)**

2. Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan

- a. Angka Partisipasi Murni
- b. Peta Mutu Pendidikan

3. Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan

- a. **Penanganan Stunting (Balita)**
- b. **Balita yang mendapatkan imunisasi lengkap**
- c. **Persalinan di fasilitas kesehatan**

4. Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur

- a. **Akses sanitasi Layak**
- b. **Sumber air minum layak**

5. Kesejahteraan Masyarakat

- a. Penurunan Penduduk Miskin
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- c. **Penurunan Angka Pengangguran (baru)**

6. Pelayanan Umum Pemerintahan

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- c. Penghargaan Pembangunan Daerah
- d. Inovasi Daerah

7. Peningkatan ekspor

8. Peningkatan Investasi

9. Pengelolaan Sampah

10. Pengendalian Inflasi Daerah (baru)

11. Indeks Pencegahan Korupsi (baru)



Variabel Stunting Dalam Perhitungan DID

Penggunaan variabel stunting sebagai perhitungan pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID) mulai digunakan sejak perhitungan DID 2018. Pada DID 2018 dan DID 2019 dilakukan perhitungan komposit kategori kesehatan yang didalamnya termasuk stunting, mulai DID 2020 perhitungan dilakukan per variabel sehingga terlihat kinerja daerah khususnya penanganan stunting.

DID TA 2020

- Indikator stunting yang diperhitungkan adalah persentase jumlah bayi dibawah dua tahun yang mengalami stunting
- Sebanyak 101 Pemerintah Daerah mendapatkan alokasi DID TA 2020 dari kategori penanganan stunting dengan jumlah alokasi sebesar Rp1.078,15 miliar



DID TA 2021

- Indikator stunting yang diperhitungkan adalah persentase jumlah bayi dibawah lima tahun (balita) yang mengalami stunting
- Sebanyak 104 Pemerintah Daerah mendapatkan alokasi DID TA 2020 dari kategori penanganan stunting dengan jumlah alokasi sebesar Rp969,45miliar



DID TA 2022

DID TA 2022 akan tetap diarahkan untuk mendukung penurunan angka stunting baik dari faktor spesifik dan sensitif



KESIMPULAN

- Dukungan penurunan stunting telah dilakukan melalui TKDD sejak 2018 melalui DAK Fisik, DAK Nonfisik, DID, dan Dana Desa
- DAK Fisik dilakukan melalui bidang Kesehatan dan KB, Bidang Air Minum, dan Bidang Sanitasi, sedangkan DAK Nonfisik melalui BOK Stunting, BOKB, dan BOP PAUD.
- Dukungan DAK Fisik dan DAK Non Fisik untuk pencegahan stunting di tahun 2021 diperluas dengan bertambahnya bidang Lingkungan Hidup untuk DAK Fisik dan Jenis Ketahanan Pangan untuk DAK Non Fisik.
- Di tahun 2022, Pemerintah Pusat tetap menjadikan Program Penurunan Stunting menjadi salah satu prioritas nasional dalam RKP 2022 dengan perluasan lokus prioritas menjadi seluruh daerah di Indonesia.
- Di tahun 2022, dukungan DAK Fisik diarahkan untuk peningkatan sinergi dengan sumber dana lainnya, perbaikan mekanisme dan meningkatkan kualitas pengawasan sedangkan Nonfisik diarahkan untuk mendukung operasional pelaksanaan kegiatan penurunan stunting.
- Perlunya leadership Kepala Daerah dalam peningkatan koordinasi dan konvergensi lintas sektor di masing-masing daerah.
- Perlunya penguatan program yang saling terintegrasi antara satu dinas dengan dinas yang lain, sehingga program tersebut dapat fokus pada suatu tujuan tertentu dan memiliki indikator capaian kinerja yang jelas dan terukur.
- Pendanaan dalam APBD tersebut juga harus disinergikan dengan dukungan dari Pemerintah Pusat, baik melalui belanja K/L maupun transfer ke daerah dan juga yang didanai melalui Desa
- Penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting oleh Daerah sebagai syarat penyaluran Dana Desa untuk memastikan bahwa dana yang telah dikeluarkan benar-benar memberikan hasil sesuai target dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya



TERIMA KASIH



LAMPIRAN

DAK FISIK

Bidang dan Tema DAK Fisik TA 2020-2022

2020 (16 Bidang)

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Sanitasi
4. Air Minum
5. Perkim
6. Jalan
7. IKM
8. Pariwisata
9. Kelautan dan Perikanan
10. Pertanian
11. Irigasi
12. LHK
13. Transportasi Perdesaan
14. Pasar
- 15. Transportasi Laut**
- 16. Sosial**

2021 (14 Bidang)

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Sanitasi
4. Air Minum
5. Perkim
6. Jalan
7. IKM
8. Pariwisata
9. Kelautan dan Perikanan
10. Pertanian
11. Irigasi
12. LHK
13. Transportasi Laut
14. Transportasi Perdesaan

DAK Penugasan 2021

- ☐ **Tematik Penurunan Kematian Ibu dan Stunting**
(Bidang Kesehatan dan KB, Sanitasi, Air Minum, LHK)
- ☐ **Tematik Penanggulangan Kemiskinan**
(Bidang Sanitasi, Air Minum, Perkim)
- ☐ **Tematik Ketahanan Pangan**
(Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Irigasi, Jalan, LHK)
- ☐ **Tematik Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan**
(Bidang IKM, Pariwisata, Jalan, LH)

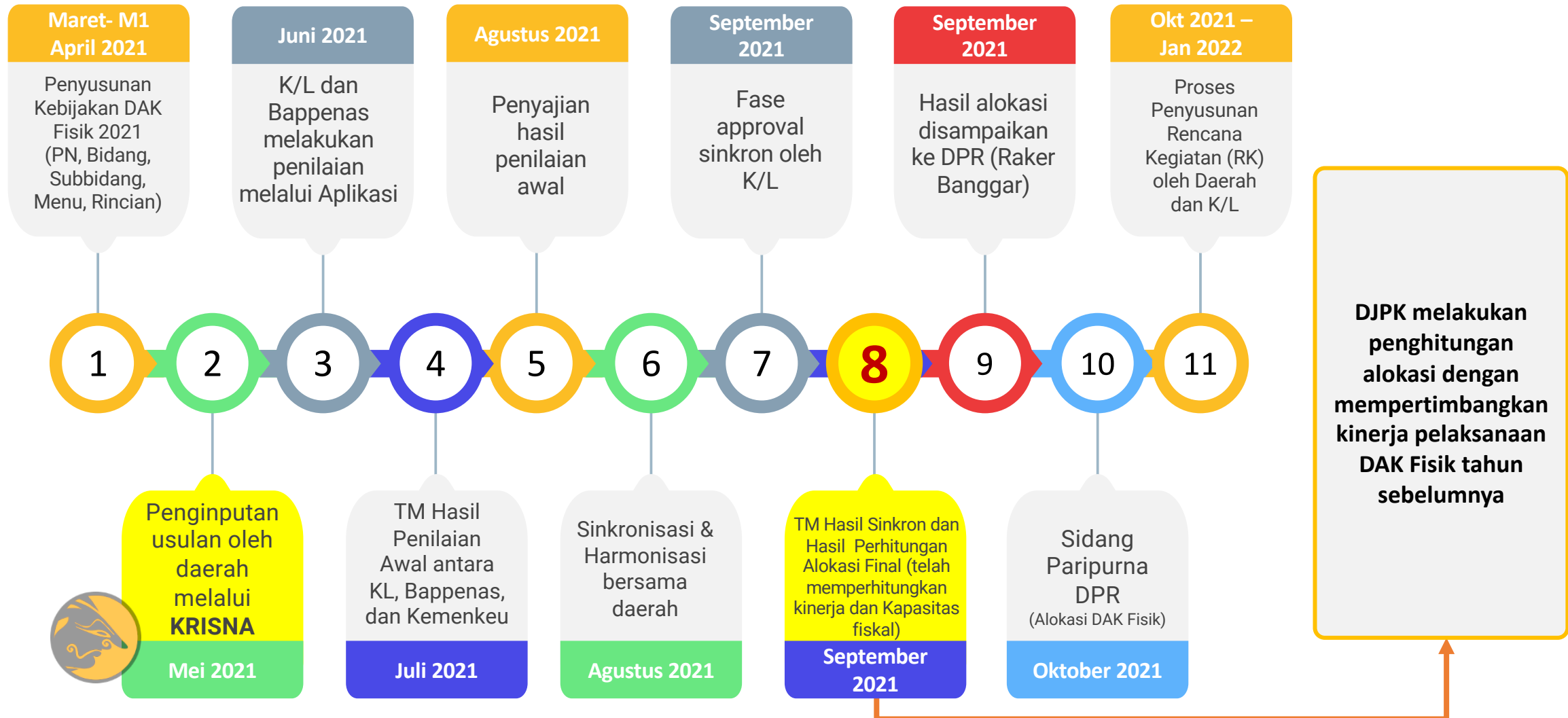
2022 (16 Bidang)

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Sanitasi
4. Air Minum
5. Perkim
6. Jalan
7. IKM
8. Pariwisata
9. Kelautan dan Perikanan
10. Pertanian
11. Irigasi
12. LHK
13. Transportasi Perairan
14. Transportasi Perdesaan
- 15. Perdagangan**
- 16. UMKM**

DAK Penugasan 2022

- ☐ **Tematik Penguatan DPP dan Sentra IKM**
(Bidang Pariwisata, IKM, Jalan, LH, Perdagangan, UMKM)
- ☐ **Tematik Food Estated dan Sentra Produksi Pangan**
(Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Jalan, Irigasi, Kehutanan, Perdagangan)
- ☐ **Tematik Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Papua**
(Bidang Transportasi Perdesaan, Transportasi Perairan, Jalan)

JADWAL PENGALOKASIAN DAK FISIK TAHUN 2022



*Jadwal tentative sesuai perkembangan pembahasan kebijakan

Strategi Pengalokasian dan Penyaluran DAK FISIK

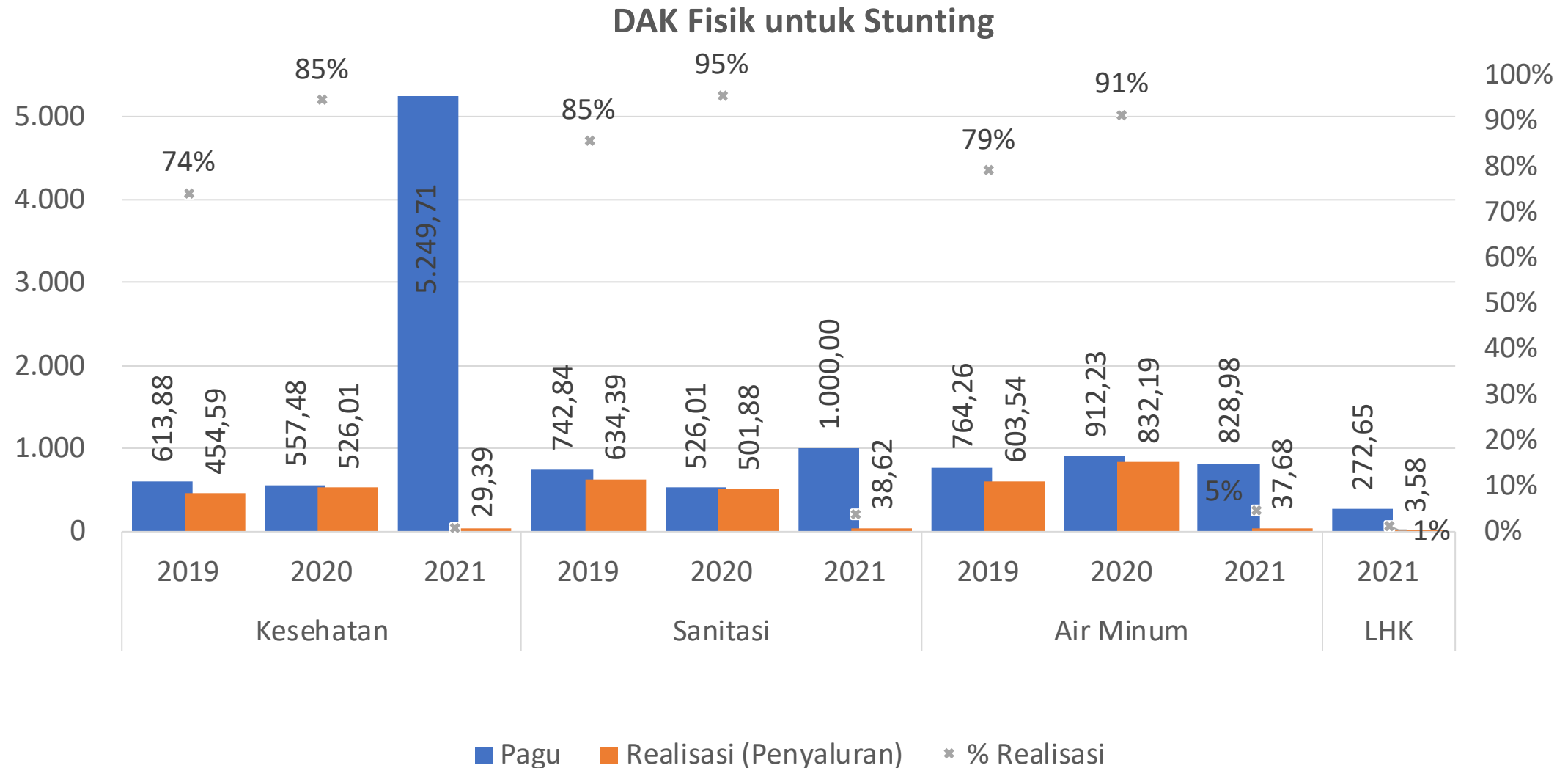
PENGALOKASIAN memperhatikan

- Hasil penilaian teknis oleh Kementerian/Lembaga
- Kinerja realisasi DAK Fisik TA (serapan dana dan capaian output) sebelumnya
Reward and punishment berdasarkan kinerja DAK Fisik Daerah
- Kapasitas fiskal daerah

PENYALURAN

- Penyaluran DAK Fisik dilakukan berdasarkan kinerja.
- Daerah menyampaikan laporan capaian realisasi penyerapan dan realisasi capaian output, sebagai syarat salur
- Laporan realisasi telah direviu oleh APIP Daerah
- Penyaluran berdasarkan data kontrak
- Dalam kondisi tertentu (mis. Bencana alam) dapat dilakukan penyesuaian, namun dapat melibatkan BPKP untuk melakukan reviu.
- BPKP juga berperan untuk melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP Daerah.

Dukungan Anggaran DAK Fisik untuk Penurunan Stunting TA 2019-2021





Dukungan DAK Fisik TA 2022

untuk Mendukung Percepatan Pencegahan Stunting

Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana

Bidang	Menu Kegiatan	Rincian Kegiatan
Kesehatan (Subbidang Penguatan Percepatan Penurunan Stunting)	Penyediaan makanan tambahan (pabrikan)	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Makanan Tambahan Bumil KEK (Provinsi) • Penyediaan Makanan Tambahan Balita Kurus (Provinsi)
	Penguatan promosi, surveilans dan tata laksana gizi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Alat Antropometri (Kab/Kota) • Sanitarian kit (Kab/Kota) • Kesling kit (Kab/Kota)
Kesehatan (Subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi)	Sarana Puskesmas Mampu Poned	<ul style="list-style-type: none"> • Renovasi/Penambahan Ruang Puskesmas
	Alat Kesehatan Puskesmas Mampu Poned	<ul style="list-style-type: none"> • Set Pemeriksaan Kesehatan ibu dan anak • Set obsgyn • Set kegawatdaruratan maternal dan neonatal • Set perawatan pasca persalinan
	Sarana Rumah Sakit PONEK	<ul style="list-style-type: none"> • Neonatal ICU (NICU) • Pediatric ICU (PICU)
	Alat Kesehatan Rumah Sakit PONEK	<ul style="list-style-type: none"> • Neonatal ICU (NICU) • Pediatric ICU (PICU)
	Penguatan PSC 119	<ul style="list-style-type: none"> • Alat Sistem Informasi (SI) PSC 119
	Telekonsultasi	<ul style="list-style-type: none"> • USG 2D Digital • Cardiotocography (CTG) • Sistem Informasi
	Unit Transfusi Darah (UTD)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan UTD • Mobil UTD • Alat UTD
Keluarga Berencana	Sarana Prasarana Percepatan Penurunan Stunting	<ul style="list-style-type: none"> • BKB Kit Stunting • Kit Siap Nikah



Dukungan DAK Fisik TA 2022

untuk Mendukung Percepatan Pencegahan Stunting

Bidang Air Minum

Bidang	Menu Kegiatan	Rincian Kegiatan
Air Minum	Perluasan SPAM JP	<ul style="list-style-type: none">Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR)
	Pembangunan Baru SPAM JP	<ul style="list-style-type: none">Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Broncaptering/Sumur Dalam Terlindungi
	Peningkatan SPAM JP	<ul style="list-style-type: none">Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering
	Pembangunan Transmisi Air Curah untuk SPAM Regional	<ul style="list-style-type: none">Pengembangan Jaringan Distribusi Utama (JDU)
	Pembangunan SPAM BJP Komunal	<ul style="list-style-type: none">Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi/Penampungan Air Hujan (PAH)/Penangkap Mata Air (PMA)
	Perluasan SPAM JP (DAK Integrasi)	<ul style="list-style-type: none">Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR)
	Pembangunan Baru SPAM JP (DAK Integrasi)	<ul style="list-style-type: none">Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Pembangunan Broncaptering/Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
	Peningkatan SPAM JP (DAK Integrasi)	<ul style="list-style-type: none">Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering



Dukungan DAK Fisik TA 2022

untuk Mendukung Percepatan Pencegahan Stunting

Bidang Sanitasi

Bidang	Menu Kegiatan	Rincian Kegiatan
Sanitasi	Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan IPAL skala permukiman minimal 50 KK• Pembangunan baru IPAL skala permukiman kombinasi MCK minimal 50 KK• Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki SPALD-T skala permukiman dan masih memiliki idle capacity
	Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) (DAK Terintegrasi)	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan IPAL skala permukiman minimal 50 KK (DAK Terintegrasi)• Pembangunan baru IPAL skala permukiman kombinasi MCK minimal 50 KK (DAK Terintegrasi)• Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki SPALD-T skala permukiman dan masih memiliki idle capacity (DAK Terintegrasi)
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan tangki septik komunal (5-10 KK)• Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan minimal 50 KK• Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK• Pengadaan truk tinja
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (DAK Terintegrasi)	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan tangki septik komunal (5-10 KK) (DAK Terintegrasi)
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan TPS3R
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah (DAK Terintegrasi)	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan TPS3R (DAK Terintegrasi)

DAK NONFISIK



Perencanaan dan Pengalokasian DAK Nonfisik

(Dasar Hukum : PMK Nomor 48 tahun 2019, PMK Nomor 9 Tahun 2020 dan PMK 197 Tahun 2020)



Penyaluran DAK Nonfisik



Penyaluran

1. Penyaluran DAK Nonfisik memperhitungkan sisa DAK Nonfisik tahun sebelumnya.
2. Penyaluran DAK Nonfisik dilaksanakan dalam dua tahap, kecuali dana BOS dan Tunjangan Guru.
3. Penyaluran DAK Nonfisik mempertimbangkan kinerja penyerapan Pemerintah Daerah, dengan minimal penyerapan 50% sebagai syarat salur tahap berikutnya.
4. Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah langsung ke Rekening Sekolah
5. Perlunya peran APIP dalam pengawasan penyerapan DAK Nonfisik guna meningkatkan ketercapaian output dan outcome serta belanja yang efektif dan efisien.



Kinerja Dukungan Anggaran untuk Penurunan Stunting TA 2019-2021

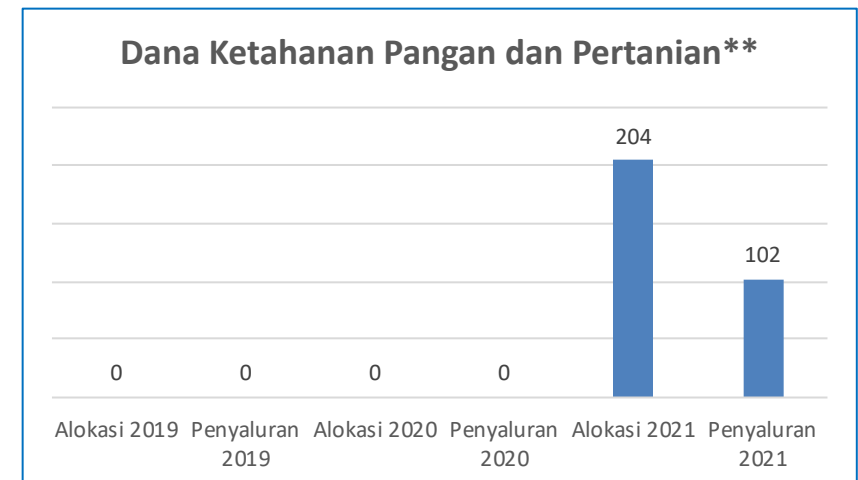
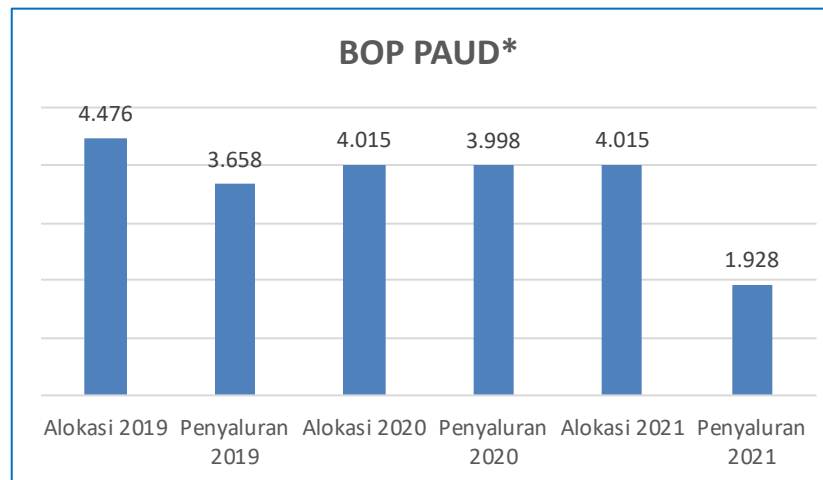
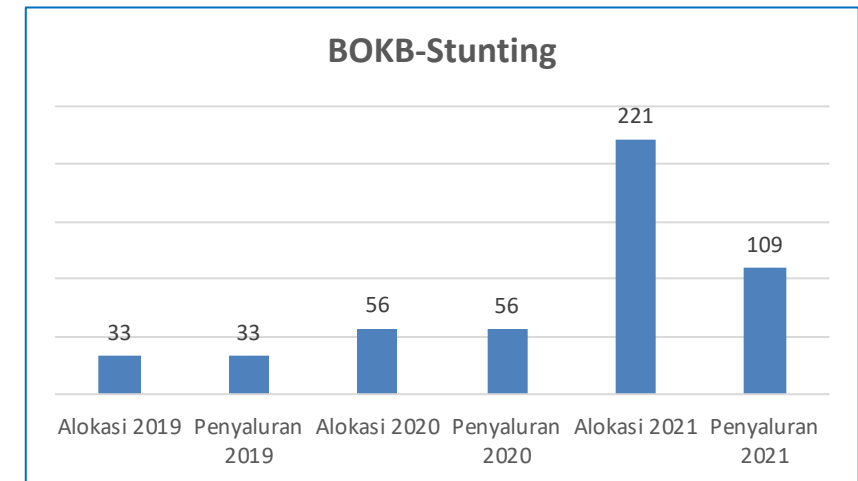
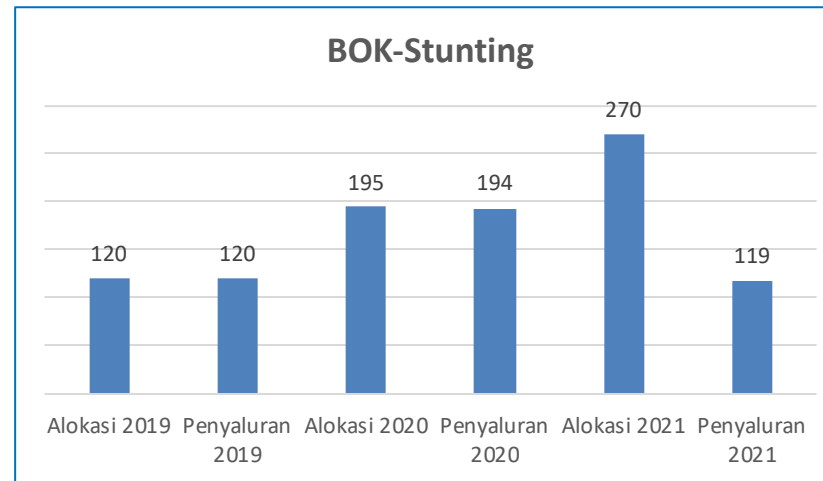
DAK Non Fisik

Catatan:

*Kegiatan yang mendukung penanganan stunting ada di Kegiatan Pendukung Pembelajaran (penyediaan makanan tambahan untuk siswa PAUD)

**Kegiatan yang mendukung penanganan stunting ada di Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)

(Dalam Milyar Rupiah)



Data per 20 Mei 2021



DAK NONFISIK

untuk Program Pencegahan Stunting



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

No	Kegiatan BOK	Sub Kegiatan	Rincian Kegiatan Yang berhubungan dengan Stunting
1	BOK Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> Kegiatan Kesehatan Masyarakat tingkat provinsi Pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat tingkat provinsi Upaya deteksi dini, preventif, dan respons penyakit Pembinaan kapasitas Labkesda pasca akreditasi 	<ol style="list-style-type: none"> Pelacakan dan konfirmasi masalah gizi (surveilans gizi) Operasional Penguatan Manajemen Data Konvergensi LP/LS, ormas, organisasi profesi, akademisi untuk penurunan stunting Peningkatan kapasitas petugas kab kota <ul style="list-style-type: none"> Pelatihan tatalaksana Gibur, PMBA, PAG, PP Orientasi komunikasi perubahan perilaku Orientasi Pelayanan Kesehatan Balita (Tumbuh kembang, MTBS) Orientasi STBM, UKS Promosi/kampanye Program Gizi Seimbang & Isi Piringku dan factor spesifik stunting
2	BOK Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> Kegiatan Kesehatan Masyarakat tingkat Kab/Kota Penguatan 5 tujuan gerakan masyarakat hidup sehat Upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit Pengujian kalibrasi alat kesehatan Puskesmas Peningkatan Mutu Pemeriksaan Labkesda (Pemantapan Mutu Eksternal (PME)) 	<ol style="list-style-type: none"> Pelacakan dan konfirmasi masalah gizi (surveilans gizi) Operasional Penguatan Manajemen Data Peningkatan kapasitas petugas puskesmas <ul style="list-style-type: none"> Pelatihan tatalaksana Gibur, PMBA, PAG, PP Orientasi komunikasi perubahan perilaku Orientasi Pelayanan Kesehatan Balita (Tumbuh kembang, MTBS) Orientasi STBM, UKS Promosi/kampanye Program Gizi Seimbang & Isi Piringku dan factor spesifik stunting
3	BOK Puskesmas	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat di wilayah kerja Kegiatan Kesehatan Masyarakat tingkat Puskesmas Upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit Pemicuan STBM desa/kelurahan prioritas Dukungan operasional UKM Tim Nusantara Sehat 	<p>Prevent/Pencegahan</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, PAUD, TK; Pelaksanaan bulan penimbangan, bulan vitamin A, pemberian TTD pada rematri dan ibu hamil Pemberdayaan masyarakat, kader, guru, toma, toga, di level Kecamatan Inspeksi Kesling, pemicuan STBM, perilaku kesehatan, SBS <p>Detect/Penemuan Kasus</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendataan & pemutakhiran sasaran program kes (KIA, Gizi, kasus penyakit) Pelacakan dan pendampingan penduduk dengan risiko masalah KIA Gizi (pendekatan PIS PK) <p>Respon</p> <ol style="list-style-type: none"> Edukasi, konseling Pemberian Makan Bayi Anak, ASI Eksklusif, dan Gizi seimbang Pemberian MT bumil KEK dan balita kurs berbahan baku lokal, Vit A, TTD ibu hamil dan Rematri, pengawasan minum TTD Peningkatan cakupan pelayanan melalui kunjungan rumah
4	BOK Stunting	BOK Stunting	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan regulasi daerah terkait stunting Pemetaan dan analisis situasi program stunting Pemetaan dan analisis situasi program stunting Pelaksanaan rembuk stunting Pembinaan kader pembangunan manusia Pengukuran dan publikasi stunting Pencatatan dan pelaporan Reviu kinerja tahunan aksi integrasi stunting



DAK NONFISIK

untuk Program Pencegahan Stunting

Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

No	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Operasional Penurunan Stunting	1. Operasional Pendampingan Ibu Hamil di desa 2. Operasional Pendampingan Pascapersalinan di desa 3. Operasional Surveillance Stunting tingkat desa (paket data untuk pelaporan) 4. Mini lokakarya Kecamatan 5. Audit kasus Stunting

Bantuan Operasional Pendidikan PAUD (BOP PAUD)

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Kegiatan Yang berhubungan dengan Stunting
1	Kegiatan Pendukung Pembelajaran	1. Penyediaan makanan sehat, penyediaan buku administrasi, Pembelian alat-alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK), pembelian obat-obatan ringan, dan isi Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) 2. Kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid (kegiatan parenting) 3. Transport Pendidik	Catatan: Kegiatan yang mendukung penanganan stunting ada di Kegiatan Pendukung Pembelajaran (penyediaan makanan tambahan untuk siswa PAUD)

Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Kegiatan Yang berhubungan dengan Stunting
1	Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	pengadaan sarana pembibitan pengembangan pendampingan/pelatihan demplot kegiatan pertanaman kegiatan pascapanen	Catatan: Kegiatan yang mendukung penanganan stunting ada di Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)



DAK Nonfisik untuk Mendukung Penurunan Stunting TA 2021(1)

Subkegiatan BOK Stunting

- 2021 dengan alokasi **Rp270 M** (360 daerah)
- Diusulkan oleh Kementerian Kesehatan
- Rata – rata per daerah Rp750 juta

Subkegiatan BOKB Desa Stunting

- 2021 dengan alokasi **Rp221 M** (360 daerah)
- Diusulkan oleh BKKBN

BOP PAUD

- 2021 dengan alokasi **Rp4.0 T**
Alokasi untuk kegiatan dukungan pembelajaran (terkait dengan stunting) baru diketahui setelah pemda menyampaikan laporan

Ketahanan Pangan dan Pertanian

- 2021 dengan alokasi **Rp204 M** (451 daerah)



- **Alokasi Untuk Dukungan Stunting Pada Tahun 2021 mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya Daerah lokus stunting dari 260 lokus menjadi 360 lokus**
- **Pada Tahun 2021 terdapat Jenis dana DAK Nonfisik yang baru yang mendukung program pencegahan stunting, yaitu Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian**



DAK Nonfisik untuk Mendukung Penurunan Stunting TA 2021 (2)

Dukungan Dana BOK untuk Program Penurunan Stunting melalui :

BOK Stunting

Ditujukan untuk :

- Meningkatkan peran lintas program dan lintas sektor dalam percepatan penurunan prevalensi stunting.
- Mendorong upaya konvergensi lintas program dan lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting.

BOK Stunting dikelola dinas kesehatan kabupaten/kota berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda).

BOK Dinas Kab./Kota

- Peningkatan Mutu dan Konsumsi Gizi : Konvergensi, Koordinasi dan Konsolidasi LP/LS untuk penurunan stunting
- Mobilisasi sosial/masyarakat percepatan pencegahan stunting

BOK Dinas Provinsi

Konvergensi, koordinasi dan konsolidasi LP/LS untuk penurunan stunting

BOK Dinas Puskesmas

- Penyelenggaraan kegiatan untuk penurunan stunting dimulai dari masa remaja, ibu hamil, sampai dengan anak berumur dua tahun.
- Pemberdayaan masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting di level kecamatan/desa

Dukungan Dana BOKB untuk Program Penurunan Stunting melalui :

Kegiatan Operasional Pencegahan Stunting

Ditujukan untuk meningkatkan peserta KB dari keluarga yang memiliki anak usia di bawah 2 tahun, menurunkan prevalensi stunting di Kampung KB, mempercepat penurunan AKI dan Stunting melalui penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan penguatan pengasukan 1000 HPK